

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut :

"Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".

Menurut Hery, SE, M.Si (2013) Laporan Keuangan adalah :

"Laporan Keuangan, sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi, merupakan salah satu pertanggungjawaban manajemen kepada pihak prinsipal (investor, pemilik dana untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode"

Menurut Kasmir (2012:7), laporan keuangan adalah :

"Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu"

Jadi dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan yang secara periodik, dilakukan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan. Dengan kata laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan

ekonomi. Dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari sistem akuntansi yang digunakan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah dan Lembaga sektor publik. Standar akuntansi pemerintahan diatur dalam PP 71 tahun 2010.

2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen laporan keuangan berbasis akrual adalah laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual meskipun pelaksanaan akrual murni diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya

ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- 1). Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2). Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari

segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.1 Format LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

URAIAN	ANGGARAN 20xx	REALISASI 20xx	(%)	REALISASI 20xx
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	XXXX	XXXX		XXXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXXX	XXXX		XXXX
BELANJA				
Belanja Pegawai	XXXX	XXXX		XXXX
Belanja Barang	XXXX	XXXX		XXXX
Belanja Modal	XXXX	XXXX		XXXX
Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX		XXXX
JUMLAH BELANJA	XXXX	XXXX		XXXX
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	XXXX	XXXX		XXXX

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas

kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Apabila laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Tabel 2.2 Format LAPORAN OPERASIONAL**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx**

U R A I A N	20xx	20xx	Kenaikan /Penuruna	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan pajak	XXXX	XXXX	XXXX	XX
JUMLAH PENDAPATAN	XXXX	XXXX	XXXX	XX
BEBAN				
Beban Pegawai	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Persediaan	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Barang dan Jasa	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Pemeliharaan	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Perjalanan Dinas	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	XXXX	XXXX	XX
JUMLAH BEBAN	XXXX	XXXX	XXXX	XX
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	XXXX	XXXX	XXXX	XX
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXXX	XXXX	XXXX	XX
Defisit Selisih Kurs	XXXX	XXXX	XXXX	XX
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXXX	XXXX	XXXX	XX
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXXX	XXXX	XXXX	XX
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO	XXXX	XXXX	XXXX	XX

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus atau defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Tabel 2.3 Format NERACA
Per 31 Desember 20xx Dan 31 Desember 20xx

URAIAN	30 JUNI/31 DESEMBER 20xx	30 JUNI/31 DESEMBER 20xx
ASET		
ASET LANCAR		
Kas/Setara Kas	XXXX	XXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX
Piutang	XXXX	XXXX
Penyisihan piutang	XXXX	XXXX
Pendapatan yang masih harus diterima	XXXX	XXXX
Persediaan	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Lancar	XXXX	XXXX
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan	XXXX	XXXX
Penyisihan Piutang Jangka panjang tak tertagih	XXXX	XXXX
Jumlah Piutang jangka Panjang	XXXX	XXXX
AST TETAP		
Tanah	XXXX	XXXX
Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
Aset Tetap lainnya	XXXX	XXXX
Konstruksi dalam pengerjaan	XXXX	XXXX
Akumulasi penyusutan Aset Tetap	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Tetap	XXXX	XXXX
ASET LAINNYA		
Aset Tidak berwujud	XXXX	XXXX
Aset Lain-lain	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya	XXXX	XXXX
Jumlah aset Lainnya	XXXX	XXXX
Jumlah Aset	XXXX	XXXX
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang Muka dari KPPN	XXXX	XXXX
Utang kepada pihak ke tiga	XXXX	XXXX
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Beban yang masih harus dibayar	XXXX	XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXXX	XXXX
Jumlah Kewajiban	XXXX	XXXX
EKUITAS		
Ekuitas	XXXX	XXXX
Jumlah Ekuitas	XXXX	XXXX
Jumlah Kewajiban dan ekuitas	XXXX	XXXX

f. Laporan Arus Kas

Menurut Zaki Baridwan (2012) Laporan arus kas sebagai berikut:

“Laporan arus kas adalah laporan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.”

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah.

Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- 2). Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- 3). Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 4). Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- 5). Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
- 6). Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya.
- 7). Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut SAK ETAP (2016) karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini pengguna di asumsikan memiliki kemampuan yang memadai tentang aktivitas dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,

kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat informasi, harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kelsalahan dalam memcatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (amission) atau kesalahan dalam memcatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP aga mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan tau arus kas suatu entitas.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah

atau pencatatan kewajiban tau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak menngijinkan bias.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansinya.

8. Dapat Dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk megevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi da peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan., perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh perubahan dampak perubahan tersebut.

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan tidak yang semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

10 Keseimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

4. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010) Akuntansi Sektor Publik adalah :

“Mekanisme dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan yang berasal dari masyarakat agar dapat dikelola secara transparan dan bertanggungjawab. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Organisasi sektor publik dituntut agar lebih efisien dalam mengelola biaya sosial dan ekonomi dalam memanfaatkannya untuk publik serta dampak dari aktivitas yang dilakukan. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas (pertanggungjawaban) publik oleh pemerintah pusat, daerah, unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara (sektor publik) menjadikan akuntansi sektor publik dapat cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan guna mengelola urusan-urusan publik.

Laporan Keuangan yang dihasilkan organisasi publik, sebagai bentuk akuntabilitas publik, seharusnya menggambarkan kondisi yang komprehensif tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan (disclosure) atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan memerlukan perangkat yang berupa standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang menggunakan sistem pencatatan berpasangan.

Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi komersial lainnya. Organisasi ini bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat luas seperti

pelayanan Pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya, serta tidak mencari keuntungan bagi pemegang saham.

Menurut H. Mutiha dan IG Ketut A (2016) perbedaan organisasi sektor publik dengan komersial adalah :

1) Tujuan organisasi

Organisasi komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui pelayanan.

2) Sumber-sumber Pendanaan

Organisasi komersial mendapatkan dana melalui hasil operasional perusahaan dan investasi dari pemegang saham. Sementara organisasi sektor publik mendapatkan dana tidak melalui laba operasi, tetapi melalui sumbangan sukarela. Berbeda dengan organisasi sektor publik pemerintahan yang memperoleh dananya dari penerimaan pajak, hibah dan penerimaan lainnya.

3) Peraturan perundangan

Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga pendidikan XYZ adalah sebuah lembaga yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan.

5. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi sangat berkaitan dengan konsep pengakuan dan pengukuran

Pengakuan adalah proses terpenuhinya penetapan kriteria pencatatan suatu transaksi atau peristiwa ke dalam pencatatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian dalam melengkapi unsur-unsur laporan keuangan. Sedangkan pengukuran adalah konsep yang digunakan untuk mendukung pengakuan diperlukan kriteria untuk menentukan jumlah besaran nilai uang yang akan dicantumkan. Pada umumnya, terdapat jenis basis akuntansi, yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

1) Kas Basis

Menurut Indra Bastian (2010) kas basis adalah :

“Mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan”.

Pencatatan utama dalam kas basis adalah penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan transaksi akuntansi berbasis kas merupakan teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk laporan penerimaan dan pembayaran atau laporan arus kas.

Dengan mencerminkan karakteristik akuntansi sektor publik, akuntansi berbasis kas dapat diartikan sebagai sistem akuntansi yang hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Transaksi dicatat atau diakui

apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan diakui ketika kas atau uang telah diterima dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran kas. Kas basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :

a. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada kas basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep kas basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih.

b. Pengakuan Biaya

Pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga.

Metode pencatatan kas basis memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan, antara lain :

Keunggulan pencatatan akuntansi secara kas basis.

- 1). Metode kas basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2). Biaya belum diakui sampai adanya pembayaran atas kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
- 3). Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.

- 4). Dibuatnya jurnal penerimaan kas jika kas diakui sebagai pendapatan. Laporan keuangan yang disajikan dengan cara membuat neraca keuangan yang ada. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat cadangan untuk kas yang belum tertagih.

Kelemahan pencatatan akuntansi secara kas basis.

- 1). Metode kas basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
- 2). Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
- 3). Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
- 4). Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
- 5). Peran akuntansi manajemen dalam perusahaan paling sulit adalah menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu bergantung kepada kas.

2) Akrua Basis

Menurut Halim dan Kusufi (2012) Basis akrual adalah :

“Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya”.

Menurut Erlina Rasdianto (2013) Basis akrual (accrual basis) adalah :

“Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya”.

Menurut Mustofa (2006) akuntansi berbasis akrual adalah :

“Suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan”.

Basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar – benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :

a. Pengakuan pendapatan.

Saat pengakuan pendapatan pada akrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep akrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya

dalam akrual basis kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

b. Pengakuan biaya

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar.

Metode pencatatan akrual basis memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan, antara lain :

Keunggulan Akrual Basis

Untuk mencapai tujuan akuntansi sektor publik, terdapat keunggulan pencatatan akuntansi secara accrual basis adalah sebagai berikut:

- 1). Metode akrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- 2). Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- 3). Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga akuntansi sebagai sistem informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima. Sehingga ada peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.

- 4). Adanya pembentukan cadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Kelemahan pencatatan akuntansi secara akrual basis.

- 1). Metode akrual basis digunakan untuk pencatatan.
- 2). Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif dalam metode pengumpulan biaya.
- 3). Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih dan pembentukan cadangan sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.

Terhitung tahun 2015 Lembaga Pendidikan XYZ dalam penyajian laporan keuangan menggunakan metode pencatatan secara akrual basis secara bertahap. Lembaga pendidikan XYZ dalam penyusunan laporan keuangan sebelum sampai dengan tahun 2014 dalam penyusunan laporan keuangan pencatatannya menggunakan metode kas basis.

Metode pencatatan dalam akuntansi menjadi pijakan yang penting dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam menentukan pencatatan dan pelaporan.

B. Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.4 Penelitian terdahulu dibawah ini :

Tabel 2.4 Penelitian terdahulu

No.	Judul dan Penelitian		Kesimpulan
1	Evaluasi Penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrua : Studi Kasus pada Kabupaten Nganjuk, Dahlia Firdaus (2015)	Kualitatif	Penyusunan Laporan Keuangan pada Kabupaten Ngajuk masih dalam taraf cash to arua (CTA)
2..	Penerapan Standar Akunatansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT, Agnes Apriani Diaz (2015)	Kualitatif	Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemda NTT masih dalam taraf cash to arua (CTA)
3.	Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Studi Kasus pada Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, Nasufa Hunain Akmal (2015)	Kualitatif	Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemda Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih belum sepenuhnya, masih dalam taraf cash to arua (CTA)
4.	Analisis Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrua pada pemerintah kota Tomohon, Sony Lamonisi (2016)	Kualitatif	Penerapan akuntansi berbasis akrua sudah dipahami, tetapi masih perlu adanya pelatihan untuk SDM
5.	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Sekretariat DRD Kabupaten Malang berdasar Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, Neni Rahmawati (2016)	Kualitatif	Adanya penambahan pos-pos dalam laporan keuangan berbasis akrua, penyajian laporan keuangan berbasis akrua akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun anggaran 2016.
6.	Evaluasi dan Tantangan Pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrua sebagai wujud pencapaian good governance, Fadlan Maulana (2016)	Kualitatif	Penerapan SAP berbasis akrua di Dinas PPKAD belum begitu efektif. Hal ini terkait kendala teknis dan kesiapan aparatur yang belum sepenuhnya paham dan

			menguasai SAP berbasis akrual. Namun, manfaat dengan diterapkannya SAP berbasis akrual sudah dirasakan.
7.	Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak, Sari Zafitri (2015)	Kualitatif	Politeknik Negeri Pontianak dirasa perlu melakukan revaluasi aset pada nilai tanah dan mengakui penyusutan aset tetap sebagai beban.
8.	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Bersarkan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010, Wasis Nista Rintiani (2014)	Kualitatif	Penyusunan Laporan Keuangan pada kota Surabaya belum sepenuhnya menerapkan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010
9.	Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Utara, Fitria Novita (2015)	Kualitatif	Penyajian Laporan Keuangan belum sesuai dengan PP no. 71 tahun 2010 tetapi PP no 24 tahun 2005

Keberhasilan dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual harus didukung oleh berbagai pihak terutama sumber daya manusianya (SDM). Dalam pelaksanaan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ada beberapa kendala yang terjadi. Kendala yang dialami Lembaga Pendidikan XYZ dalam penerapan akuntansi berbasis akrual :

1. Keterbatasan SDM Akuntansi pada Lembaga Pendidikan XYZ.

seperti yang diungkapkan staf bagian keuangan yang menyatakan bahwa:

“Keterbatasan SDM Akuntansi pada Lembaga Pendidikan XYZ serta kurangnya pemahaman belum bisa full memahami sistem akuntansi berbasis akrual.

2. Sistem Akuntansi dan IT Based System

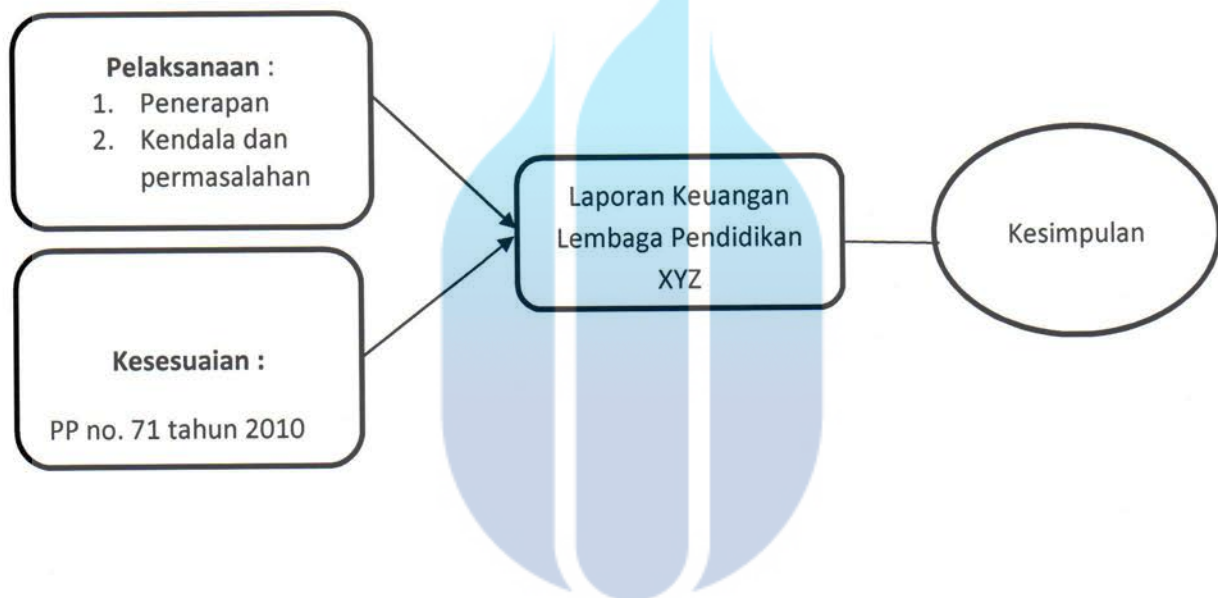
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Lembaga Pendidikan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system. Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk mengakomodasinya. Lembaga sedang membuat perencanaan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam melakukan penantausahaan penerimaan SPP. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Lembaga.

3. Resistensi terhadap perubahan

Organisasi atau Lembaga bisa sukses dan terus maju apabila selalu berproses dan mengikuti perubahan sesuai dengan keadaan lingkungan maupun perkembangan teknologi yang selalu berubah dan berkembang. Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, sebagian internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama sulit/enggan untuk mengikuti perubahan.

C. Rerangka Pemikiran

Untuk memperoleh kejelasan dan membentuk struktur penelitian dikembangkan sebuah rerangka sebagai berikut :



U N I V E R S I T A S
M E R C U B U A N A